



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 1. No. 2 (2021) Hal. 251-270

PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Wiara Hana Prasanti^{1*}, Panji Kusuma Prasetyanto²

¹²Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Tidar, Indonesia

*E-mail : wiarahana1@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of central government spending, debt interest payments, and subsidies on economic growth in Indonesia. This study also uses annual data for 1990-2019 obtained from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Kemenkue RI), BPS, and Financial Notes. The model used in this study is the Error Correction Model (ECM). Based on the results of the study, it can be concluded that simultaneously central government spending, debt interest payments and subsidies have a significant and significant effect on GDP (Gross Domestic Product) in Indonesia both in the long and short term and the variables of central government spending and subsidies have a significant effect on economic growth in Indonesia. in the short and long term, while the variable interest payments on debt has no significant effect on economic growth in Indonesia in the short and long term.

Keywords : Economic Growth, PDB , Government Expenditure, Debt Interest, Subsidy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari akan banyaknya negara yang sedang berkembang yang ada didunia. Menjadi salah satu negara yang sedang berkembang pemerintah Indonesia selalu melakukan strategi-strategi pembangunan nasional dimana nantinya bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju. Salah satu tujuan mendasar dari negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional tentu saja pada aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diupayakan terus meningkat atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila nilai output yang dihasilkan tahun ini lebih banyak dari output yang dihasilkan di tahun sebelumnya. Dengan kata lain nilai ouput bisa juga disebut dengan ukuran kuantitatif suatu perekonomian. Dengan mengetahui akan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara kita juga akan mengetahui dan dapat menganalisis kinerja negara tersebut (Wibowo et al. 2008).

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga merupakan salah satu indikator acuan keberhasilan pembangunan yang mana elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, skill, dan teknologi yang digunakan. Dengan demikian,

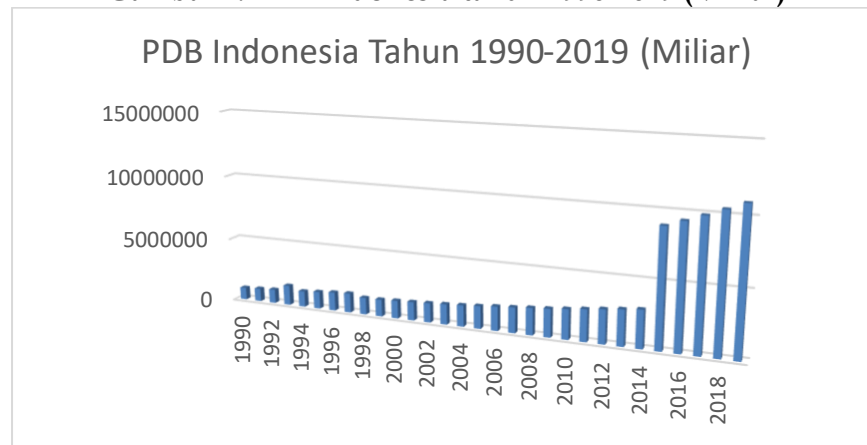
251



semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya akan makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat negara tersebut, meskipun juga terdapat indikator lain untuk melihat pencapaian keberhasilan pembangunan tersebut (Agustina and Althofia 2015). Banyak upaya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan khususnya dibidang ekonomi terlihat akan keberanian pemerintah mengeluarkan anggaran bagi pembangunan di bidang ekonomi dengan jumlah yang dapat dikatakan cukup besar. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang menjadi sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah (Setiadi 2017).

Salah satu kebijakan pemerintah yang turut dan memiliki peran dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana dalam APBN ini berisi perincian secara sistematis rencana akan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam kurun 1 tahun anggaran (Muqorrobin 2015). Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dari PDB (*Product Domestic Bruto*) yang diharapkan dengan adanya keadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan nantinya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah perkembangan PDB dan Laju Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1990 sampai dengan tahun 2019 dalam Gambar 1. dan Gambar 2.

Gambar 1. PDB Indonesia tahun 1990-2019 (Miliar)



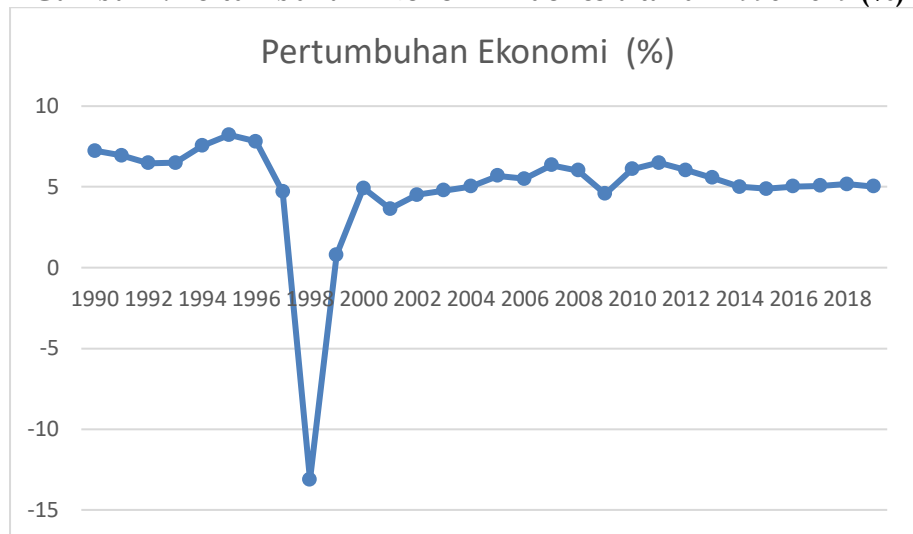
Sumber :BPS Indonesia, Data diolah

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa, Kondisi perekonomian Indonesia jika kita lihat melalui *Product Domestic Bruto* (PDB) tidak stabil namun cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dicapai melalui berbagai aspek seperti produksi, pengeluaran, dan pemasukan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat berkesinambungan dibutuhkan kerjasama yang baik



dari seluruh stakeholders yang ada disuatu negara tersebut. Salah satu peran yang diabil oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melakukan pengeluaran pemerintah. Dimana hal ini lah dapat kita kaitkan dengan kegiatan belanja pemerintah yang dilakukan dengan tujuan guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1990-2019 (%)



Sumber :BPS Indonesia, Data diolah

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa, Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang tidak stabil dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2019. Dimana pemerintah Indonesia berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8,22% pada tahun 1994. Pada tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan diakibatkan dengan adanya krisis moneter yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam yaitu -13,13% pada tahun 1998, ini juga menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Indonesia, sehingga kebijakan pemerintah pada saat itu lebih diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Memasuki tahun 2000 an perekonomian berangsur membaik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya, yang kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat sehingga berdampak pada Indonesia hingga pada tahun 2009 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai 4,58%.



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberpengaruhannya belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang, dan belanja subsidi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Apakah 3 komponen pengeluaran pemerintah tersebut mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Untuk melakukan penelitian ini digunakan analisis ECM (*Error Correction Model*).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Dalam (Mankiw 2013), pendapat Keynes menginterpretasikan bahwa kebijakan makro yaitu dimana pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat yang mempengaruhi situasi makro agar dapat mencapai kondisi full employment. Permintaan agregat merupakan keseluruhan jumlah uang yang akan dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pembelian barang dan jasa selama satu tahun. Barang jasa yang dimaksud sendiri adalah bukan barang bekas dan bukan juga barang yang diproduksi seperti tenaga kerja, tanah, air, dan faktor lainnya, namun barang dan jasa yang dimaksud yaitu barang dan jasa yang baru diproduksi selama satu tahun. Dalam modal perekonomian terbuka permintaan agregat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu konsumsi rumah tangga (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G) dan Ekspor Netto (X-M). Pengeluaran pemerintah bisa mempengaruhi variabel-variabel lain melalui hak atau peraturan yang didapatkan pemerintah dari sebuah negara dalam wujud kebijakan-kebijakan. Keberpengaruhannya pengeluaran pemerintah dapat secara langsung terhadap permintaan agregat ataupun secara tidak langsung melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, dan pengeluaran ekspor import.

Teori Belanja Pemerintah Pusat Adolf Wagner

(Guritno Mangkoesobroto. 1994), dalam bukunya mengutip pendapat tokoh yaitu Adolf Warner mengenai pendapatan perkapita yang terus meningkat juga akan berdampak pada pengeluaran pemerintah yang akan ikut meningkat secara relatif, penyebabnya karena kebijakan pemerintah untuk mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, seperti hukum, pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan.

Menurut (Sadono Sukirno 2008), berpendapat bahwa kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah adalah satu bagian yang memiliki hubungan keterkaitan, yaitu dimana merupakan strategi pemerintah untuk mengatur berjalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk regional. Upaya kebijakan fiskal dilakukan dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pemerintah masih diperlukan dalam peranan dan campur tangannya dalam perekonomian. Karena jika perekonomian diatur oleh pasar bebas maka bisa saja kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat tercapai (Nalle, Ekonomi, and Wisnuwardhana 2015).



Pembayaran Bunga Utang Teori Utang Luar Negeri Ricardian

Kebijakan utang luar negeri yang selama ini diterapkan pemerintah untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan dampak dari pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan hasil utang tersebut harus dibayar oleh pemerintah pada masa yang akan datang dengan kenaikan pajak (Neng Dilah Nur Fadillah and Sutjipto 2018).

Utang luar negeri bagi negara berkembang merupakan variabel yang sangat memiliki dampak terhadap perekonomian suatu negara. Pengelolaan utang luar negeri yang dilakukan dengan baik maka dapat membawa pembangunan ekonomi, namun jika pengelolaan utang luar negeri tidak baik akan menjadi permasalahan bagi pemerintah (Saleh 2008).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Pembayaran Bunga Utang adalah Pengeluaran Pemerintah guna untuk pembayaran bunga yang dilakukan dimana atas kewajiban penggunaan pokok utang (Principal Outstanding), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Pembayaran bunga utang juga digunakan untuk pembayaran denda atau biaya lain terkait pinjaman atau hibah dalam maupun diluar negeri. Pembayaran bunga utang dibagi menjadi dua yaitu pembayaran bunga utang dalam negeri dan pembayaran bunga utang luar negeri.

Pembayaran bunga utang dalam negeri meliputi: Bunga Surat Perbendaharaan Negara baik dalam rupiah maupun valuta asing, Bunga Surat Perbendaharaan Negara Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, Bunga obligasi negara baik dalam rupiah maupun valuta asing, Bunga surat berharga syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, Bunga pinjaman perbankan dalam negeri, Bunga pinjaman dalam negeri, dan Biaya transfer pinjaman dalam negeri.

Sedangkan Pembayaran bunga utang luar negeri meliputi: Bunga pinjaman program, Bunga pinjaman proyek, Bunga utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman, termasuk kewajiban lainnya, dan Biaya transfer atas pinjaman luar negeri.

Belanja Subsidi

Salah satu instrument yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan yang bertujuan untuk mempermudah atau meringankan beban masyarakat atas kebutuhan atau konsumsinya adalah subsidi. Misalnya dengan adanya kebijakan subsidi BBM akan berdampak pada kenaikan akan penggunaan BBM yang mana akan meningkatkan permintaan BBM dalam negeri. Dengan demikian masyarakat dan perusahaan sudah merasa nyaman dengan pembelian BBM dengan harga yang murah yang kemudian mengabaikan faktor kelangkaan sumber daya alam. Subsidi ini juga memiliki tujuan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan perekonomian suatu negara.



Efisiensi yang dimaksud adalah dengan cara mempengaruhi kegiatan produksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang optimal (Dan and Publik 2014).

Dapat menurunkan harga pada suatu barang/jasa yang diproduksi merupakan tujuan secara umum tujuan subsidi. Dalam sisi pemerintah, merupakan suatu kegiatan pengeluaran pemerintah atas belanja pemerintah yang juga dapat disebut dengan pajak negatif dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan konsumsi dengan harga yang lebih murah. Namun sampai kapan APBN terus terbelenggu beban subsidi. Di tengah keterbatasan APBN, membebaskannya dari belenggu subsidi jelas memberikan banyak ruang fiskal bagi pemerintah untuk melakukan berbagai akselerasi infrastruktur dan belanja fisik daerah. Sayangnya, hingga kini kebijakan pemerintah masih sebatas penggunaan instrumen kenaikan harga atau pembatasan konsumsi (Dan and Publik 2014).

Penelitian (Bachtiar, Sofilda, and Kusumastuti 2015), dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, Dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013” menghaasilkan bahwa variabel Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, Dan Subsidi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dua variabel bebas lainnya yakni belanja barang dan pegawai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Safari and Fikri 2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Teknis analisis data menggunakan data time series dengan model ECM (Error Correction Model) menghasilkan bahwa variabel ekspor, pembentukan modal, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap PDB baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan memiliki sifat berkala (*Time Series*) yang diperoleh dari Kemenkue, BPS, dan Nota Keuangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, PDB, belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang, dan subsidi dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Teknis analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan program *Eviews 10* menggunakan analisis ECM (*Error Correction Model*). Dengan model ini diharapkan dapat menjelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara sistematis model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PDB = f(PP_t, BU_t, Sub_t) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

PDB = tingkat pertumbuhan ekonomi/ tahun

PP_t = Belanja Pemerintah Pusat/ tahun



BU_t = Pembayaran Bunga Utang / tahun

Sub_t = Belanja Subsidi / tahun

sehingga persamaan model jangka panjang adalah:

$$PDB_t = \alpha_0 + \beta_1 PP_t + \beta_2 BU_t + \beta_3 sub_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

PP_t = Belanja Pemerintah Pusat/ tahun

BU_t = Pembayaran Bunga Utang / tahun

Sub_t = Belanja Subsidi / tahun

PDB = tingkat pertumbuhan ekonomi/ tahun

ε_t = error term

Sedangkan persamaan model jangka pendek sebagai berikut:

$$D(PDB_t) = \alpha_0 + \beta_1 D(PP_t) + \beta_2 D(BU_t) + \beta_3 D(Sub_t) + \beta_4 ECT + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3)$$

Dimana:

$D(PP_t)$ = Belanja Pemerintah Pusat/ tahun yang didiferensiasi pada first difference

(BU_t) = Pembayaran Bunga Utang / tahun yang didiferensiasi pada first difference

(Sub_t) = Belanja Subsidi / tahun yang didiferensiasi pada first difference

$D(PDB)$ = tingkat pertumbuhan ekonomi yang didiferensiasi pada first difference

ECT = Error Correction Term

Sebelum melakukan estimasi *error correction model* (ECM) perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa perilaku data yang dipergunakan dalam model adalah stasioner. Untuk itu perlu dilakukan uji akar-akar unit untuk mengetahui apakah data telah stasioner pada tingkat level.

1. Uji Stasioner

Uji akar-akar unit pada penelitian ini menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

Dalam membandingkan nilai absolut ADF hitung dengan ADF tabel digunakan nilai kritis yang telah dikembangkan oleh Mc-Kinnon Uji Derajat Kointegrasi (widarjono 2018).

Uji derajat kointegrasi dilakukan jika pada uji akar-akar unit ada satu, sebagian atau semua data dari variabel-variabel yang diamati tidak stasioner. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat atau order diferensi berapa data yang diamati akan stasioner.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pada derajat diferensi tingkat pertama atau *first difference*, nilai absolut ADF hitung semua variabel-variabel yang diamati lebih besar dari ADF kritis Mc-Kinnon pada derajat kepercayaan 5%. Hal ini berarti bahwa semua data dari variabel-variabel yang diamati sudah stasioner pada derajat yang sama sehingga bisa dilanjutkan ke uji kointegrasi.

2. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji derajat integrasi, yang dilakukan untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji



kointegrasi pada penelitian ini menggunakan uji Johansen. Uji johansen dipilih karena hasil yang ditunjukkan lebih akurat dan lebih meyakinkan. Uji ini membandingkan nilai *trace statistic* dengan nilai kritis tingkat 5% atau 1%. Apabila variabel-variabel berkointegrasi maka dapat dilanjutkan ke uji ECM (*Error Correction Model*).

3. Uji ECM

Estimasi model inflasi menggunakan model ECM bertujuan untuk mencari keseimbangan jangka pendek atau mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Untuk menyatakan apakah model ECM yang digunakan valid, dapat dilihat dari nilai *Error Correction Term* (ECT) apakah signifikan atau tidak, apabila signifikan maka itu berarti spesifikasi model dapat dibenarkan dengan menggunakan ECM.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat dalam model regresi bahwa variabel dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Variabel yang terdistribusi normal akan menghasilkan hasil yang tidak bias. Melalui uji Jarque-Berra (J-B) dengan batas nilai 10% (widarjono 2018).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinear pada penelitian.

c. Uji Heteroskedasititas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat masalah heteroskedasititas atau tidak. Uji heteroskedasititas dalam penelitian ini menggunakan bantuan uji Breusch-Pagan. Standar nilai $Obs^*R\text{-squared}$ dalam penelitian ini sebesar 5% , maka dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedasititas apabila nilainya dibawah 5%.

d. Uji Autokorelasi

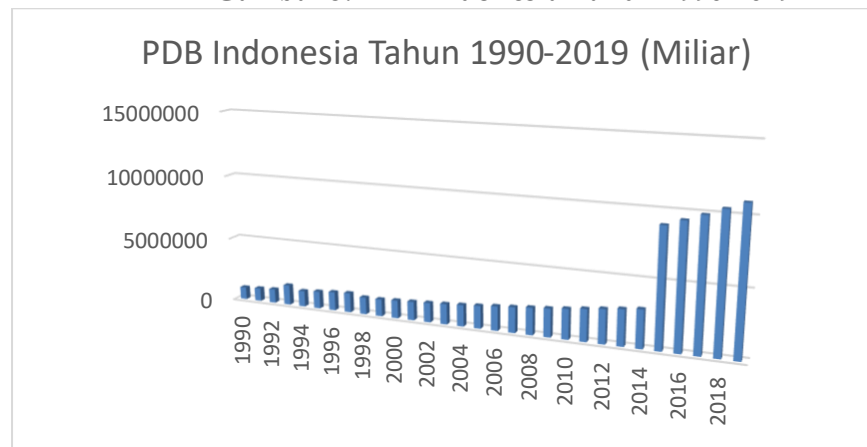
Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-Watson (D-W Test), adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati.



HASIL PENELITIAN

1. PDB (Product Domestic Bruto)

Gambar 3. PDB Indonesia Tahun 1990-2019

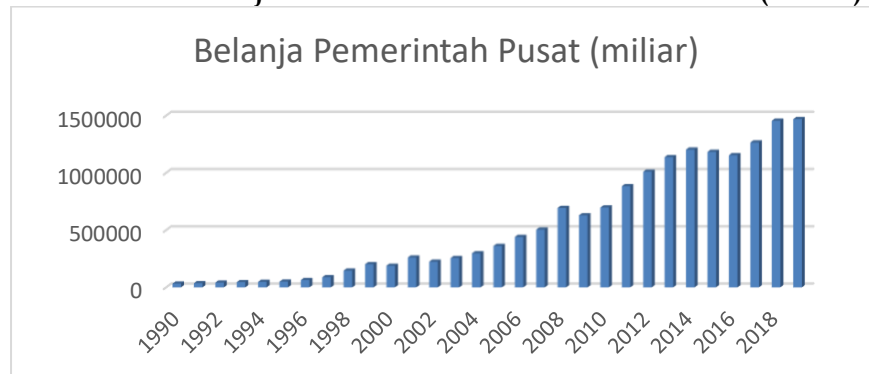


Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1990-2019 (diolah)

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa, Product Domestic Bruto (PDB) di Indonesia mengalami perkembangan yang dapat dikatakan fluktuatif dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 1990 terlihat PDB Indonesia mencapai 949640.85 milyar rupiah kemudian naik lagi ditahun 1991 dan tahun 1992 hingga pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan PDB hingga mencapai PDB tertinggi sebesar 10949243.7 miliyar rupiah.

2. Pengeluaran Pemerintah Pusat

Gambar 4. Belanja Pemerintah Pusat Tahun 1990-2019 (Miliar)



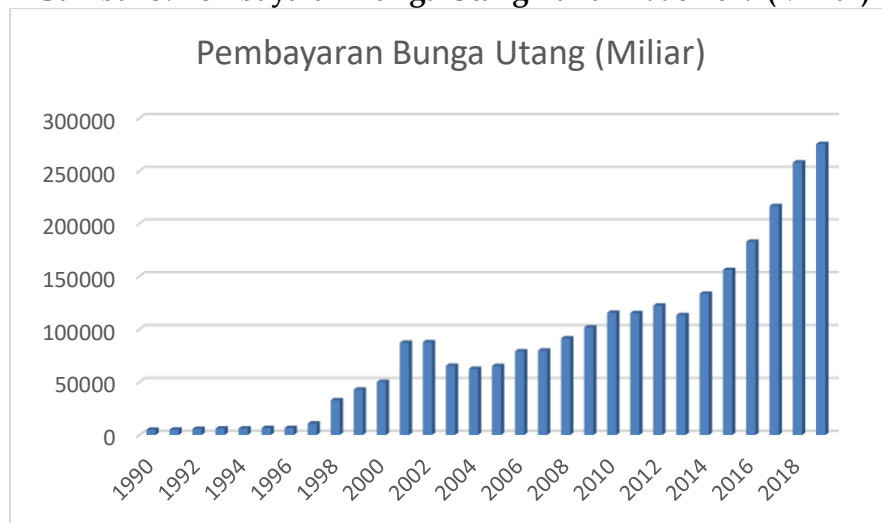
Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1990-2019 (diolah)



Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa, Dalam kurun waktu 30 tahun , mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2019 pengeluaran pemerintah pusat hampir mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Meskipun terjadi penurunan yaitu pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 2008.

3. Pembayaran Bunga Utang

Gambar 5. Pembayaran Bunga Utang Tahun 1990-2019 (Miliar)



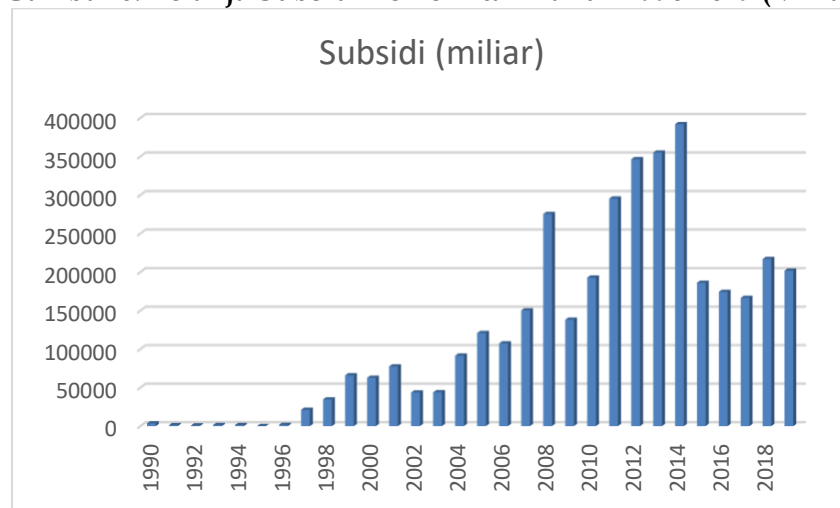
Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1990-2019 (diolah)

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa, Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2019 pembayaran bunga utang yang dilakukan pemerintah mengalami fluktuatif namun cenderung mengalami kenaikan. Dan saat terjadi krisis moneter tahun 1998 pembayaran bunga utang tetap meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



4. Belanja Subsidi

Gambar 6. Belanja Subsidi Pemerintah Tahun 1990-2019 (Miliar)



Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1990-2019 (diolah)

Berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa, Berdasarkan grafik data diatas dapat dilihat bahwa jumlah subsidi yang diberikan pemerintah dalam kurun waktu 30 tahun mengalami fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat mengenai pencabutan dan penghapusan subsidi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif merupakan rencana yang sudah lama karena negara pun juga membutuhkan anggaran utuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya.



Uji Stasioner

Tabel 1. Hasil Augmented Dickey-Fuller Unit Root pada Level

Variabe	Nilai ADF	Nilai Kritis Mc-Kimmon			Keterangan
		1%	5%	10%	
PDB	0.705966	-3.679322	-2.967767	-2.622989	Tidak stasioner
PP	1.614239	-3.679322	-2.967767	-2.622989	Tidak stasioner
BU	2.759627	-3.679322	-2.967767	-2.762989	Tidak Stasioner
SUB	-1.512394	-3.679322	-2.967767	-2.622989	Tidak Stasioner

Sumber: Eviews 10 (olah data)

Uji akar-akar unit pada penelitian ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Dalam membandingkan nilai absolut ADF hitung dengan ADF tabel digunakan nilai kritis yang telah dikembangkan oleh Mc-kinnon.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang stasioner pada derajat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% karena nilai ADF hitungnya lebih kecil dari nilai ADF kritis Mc-Kinnon, maka karena itu perlu dilanjutkan ke uji derajat integrasi (*first difference*) untuk mengetahui pada derajat seberapa data akan stasioner.

Tabel 2. Hasil Augmented Dickey-Fuller Unit Root pada First Difference

Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis Mc-Kimmon			Keterangan
		1%	5%	10%	
PDB	-4.959397	-3.689194	-2.971853	-2.625121	Stasioner
PP	-4.461248	-3.689194	-2.971853	-2.625121	Stasioner
BU	-3.181753	-3.689194	-2.971853	-2.625121	Stasioner
SUB	-5.885478	-3.689194	-2.971853	-2.625121	Stasioner

Sumber: Eviews 10 (olah data)

Uji akar-akar unit pada penelitian ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Dalam membandingkan nilai absolut ADF hitung dengan ADF tabel digunakan nilai kritis yang telah dikembangkan oleh Mc-kinnon.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa semua data dan variabel stasioner pada tingkat first difference dan pada derajat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% karena nilai ADF hitungnya lebih besar dari nilai ADF kritis Mc-Kinnon.

Uji kointegrasi



Tabel 3. Hasil Uji Kointegrasi

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.811027	81.07807	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.531422	36.09196	29.79707	0.0082
At most 2 *	0.324893	15.62453	15.49471	0.0478
At most 3 *	0.169562	5.016662	3.841466	0.0251

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.811027	44.98611	27.58434	0.0001
At most 1	0.531422	20.46744	21.13162	0.0617
At most 2	0.324893	10.60787	14.26460	0.1750
At most 3 *	0.169562	5.016662	3.841466	0.0251

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sumber: Eviews 10 (olah data)

Selanjutnya pengujian kointegrasi dengan menggunakan uji *Johansen Cointegration Test* dengan Eviews yaitu dengan mengkointegrasikan semua data variabel (group) yang digunakan dalam model penelitian tersebut, yang apabila variabel runtut waktu tersebut terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang, dengan hasilnya yaitu kita dapat membandingkan nilai trace statistic dengan nilai kritis (5%). Ternyata nilai trace statistic sebesar 81.07807 jauh lebih besar dari nilai kritis 5% (47.85613). Selain itu untuk memperkuat hasil uji



kointegrasi adalah kita bisa juga melihat hasil dari Maximum Eigenvalue Statistic yaitu dengan hasil sebesar 44.98611 lebih besar dari nilai kritis 5% sebesar 27.58434. Dari hasil ini sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kointegrasi antara ke empat variabel yaitu *Product Domestic Bruto* (PDB), Pengeluaran Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi. Hal ini menunjukkan telah terjadi keseimbangan (*equilibrium*) antara variabel-variabel ekonomi tersebut dalam jangka panjang.

1. Model ECM (*Error Correction Model*)

a. *Error Correction Model* Jangka Panjang

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PP	11.49850	1.135844	10.12331	0.0000
BU	-3.992985	5.439478	-0.734075	0.4695
SUB	-27.63183	2.149803	-12.85319	0.0000
C	756997.3	174736.3	4.332228	0.0002
R-squared	0.971162	Mean dependent var	3099115.	
Adjusted R-squared	0.967834	S.D. dependent var	3165244.	
S.E. of regression	567678.8	Akaike info criterion	29.46006	
Sum squared resid	8.38E+12	Schwarz criterion	29.64689	
Log likelihood	-437.9010	Hannan-Quinn criter.	29.51983	
F-statistic	291.8619	Durbin-Watson stat	2.222484	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 10 (olah data)



b. Error Correction Model Jangka Pendek

Tabel 5. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D1_PP	9.533906	2.258264	4.221786	0.0003
D1_BU	8.256737	7.879417	1.047887	0.3051
D1_SUB	-22.83328	2.539266	-8.992077	0.0000
RESID01_ECT(-1)	-1.021816	0.202347	-5.049825	0.0000
C	-47451.94	139109.3	-0.341113	0.7360
R-squared	0.808965	Mean dependent var	344813.9	
Adjusted R-squared	0.777126	S.D. dependent var	1117808.	
S.E. of regression	527712.4	Akaike info criterion	29.34608	
Sum squared resid	6.68E+12	Schwarz criterion	29.58182	
Log likelihood	-420.5181	Hannan-Quinn criter.	29.41991	
F-statistic	25.40784	Durbin-Watson stat	2.035097	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 10 (olah data)

Berdasarkan hasil estimasi *Error Correction Model* (ECM) jangka panjang dan jangka pendek di atas menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Subsidi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan variabel Pembayaran Bunga Utang tidak signifikan hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Sedangkan dalam jangka panjang variabel Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Subsidi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan variabel Pembayaran Bunga Utang tidak signifikan hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Ini mengindikasikan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Subsidi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.. Dengan demikian spesifikasi model *Product Domestic Bruto* (PDB) yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah valid sehingga mampu untuk menjelaskan hubungan jangka pendek maupun jangka panjang.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi



Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

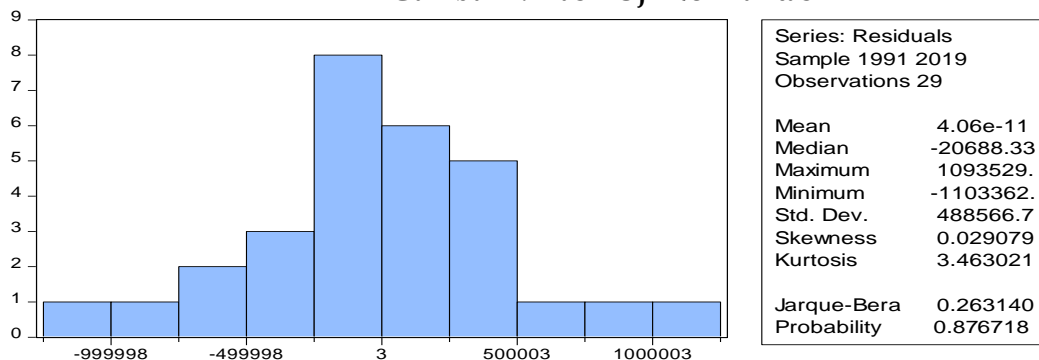
F-statistic	1.697428	Prob. F(5,19)	0.1836
Obs*R-squared	8.954264	Prob. Chi-Square(5)	0.1109

Sumber: Eviews 10 (olah data)

Uji autokorelasi yang telah dilakukan terhadap model penelitian dengan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan hasil terlihat pada hasil diatas dimana nilai Obs*R-squared adalah sebesar 8.954264 dan nilai Prob. Chi-Square(5) adalah sebesar 0.1109. Nilai ini lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga menunjukkan bahwa H0 diterima artinya bahwa model penelitian yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Normalitas

Gambar 7. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Eviews 10 (olah data)

Dari hasil Uji Normalitas diatas menunjukkan bahwa, Error Correction Model (ECM) berdistribusi normal karena nilai probabilitas jarque bera nya lebih dari 0.05 yaitu 0.876718 yang artinya lolos dari Uji Normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D1_PP	5.099755	3.606741	2.303767



D1_BU	62.08521	1.805637	1.242869
D1_SUB	6.447873	2.442622	2.411247
RESID01_ECT(-1)	0.040944	1.231803	1.231799
C	1.94E+10	2.015189	NA

Sumber: Eviews 10 (olah data)

Pengujian multikolinieritas bisa dilihat menggunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF), jika nilai Centered VIF < 10 maka tidak mengalami multikolinieritas. Dilihat dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa nilai Centered VIF < 10 maka dapat dinyatakan bahwa hasil tersebut tidak mengalami multikolinearitas.

a. Uji Heteroskedasticity

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedasticity

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.724759	Prob. F(4,24)	0.0531
Obs*R-squared	9.056755	Prob. Chi-Square(4)	0.0597
Scaled explained SS	7.639013	Prob. Chi-Square(4)	0.1057

Sumber: Eviews 10 (Olah data)

Uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan terhadap model penelitian dengan menggunakan Uji *Breusch-Pagan-Godfrey* dengan hasil terlihat pada hasil diatas dimana Prob. Obs*R-squared adalah sebesar 9.056755 dan nilai Prob. Chi-Square(4) adalah sebesar 0.0597 nilai ini lebih besar dari 0.05 (5%) sehingga menunjukkan bahwa H0 diterima artinya bahwa model penelitian yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi Jangka Pendek

a. Uji F (Uji Simultansi)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *software Eviews 10*, diperoleh nilai F-hitung sebesar 25.40784 dan probabilitas F sebesar 0,000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang, dan subsidi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya PDB . Dan model tersebut juga telah memenuhi goodness of fit.



b. Uji T (Uji Parsial)

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel terikat. Berikut kami paparkan masing-masing variabel bebasnya :

- Belanja Pemerintah Pusat
- Variabel X1 Belanja Pemerintah Pusat memiliki nilai $0.0003 < 0.05$ maka disimpulkan variabel ini signifikan terhadap variabel Y (PDB).
- Pembayaran Bunga Utang
- Variabel X2 Pembayaran Bunga Utang memiliki nilai $0.3051 > 0.05$ maka disimpulkan variabel ini tidak signifikan terhadap variabel Y (PDB).

- Subsidi
- Variabel X3 Subsidi memiliki nilai $0.0000 < 0.05$ maka disimpulkan variabel ini signifikan terhadap variabel Y (PDB).

c. Uji determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.808965. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 80,89%. Sisanya sebesar 19,11% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Persamaan Matematis

a. Jangka Pendek

$$PDB_t = 47451.9400571 + 9.53390647137PP_t + 8.25673674499BU_t - 22.8332778004SUB_t - 1.02181622787EC_t + \epsilon_t$$

Keterangan:

PDB_t = Differensiasi pertama dari variabel PDB Indonesia

PP_t = Differensiasi pertama dari variabel belanja pemerintah pusat

BU_t = Differensiasi pertama dari variabel pembayaran bunga utang

SUB_t = Differensiasi pertama dari variabel subsidi

EC_t = *Error Correction Term*

Penjelasan persamaan matematis jangka pendek:

1. + 9.53390647137 PP_t Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDB sebesar 9.53390647137 milyar rupiah.
2. + 8.25673674499 BU_t Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pembayaran bunga utang sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDB sebesar 8.25673674499 milyar rupiah.
3. - 22.8332778004 SUB_t Hal yang dimaksudkan bahwa setiap kenaikan belanja subsidi sebesar satu milyar rupiah akan menurunkan PDB sebesar 22.8332778004 milyar rupiah.



4. - 22.8332778004EC_t Hal yang dimaksudkan bahwa setiap kenaikan belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang, dan belanja subsidi sebesar satu milyar rupiah akan menurunkan sebesar PDB 22.8332778004

b. Jangka Panjang

$$PDB_t = 756997.315858 + 11.498495891 PP_t - 3.99298469239 BU_t - 27.6318258295SUB_t + \epsilon_t$$

Keterangan:

PDB_t = variabel PDB Indonesia

PP_t = variabel belanja pemerintah pusat

BU_t = variabel pembayaran bunga utang

SUB_t = variabel subsidi

Penjelasan persamaan matematis jangka panjang:

1. 11.498495891 PP_t Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDB sebesar 11.498495891 milyar rupiah.
2. - 3.99298469239 BU_t Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pembayaran bunga utang sebesar satu milyar rupiah akan menurunkan PDB sebesar 3.99298469239 milyar rupiah.
3. - 27.6318258295SUB_t Hal yang dimaksudkan bahwa setiap kenaikan belanja subsidi sebesar satu milyar rupiah akan menurunkan PDB sebesar 27.6318258295 milyar rupiah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data pengaruh belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang, dan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, secara simultan pengeluaran pemerintah pusat, pembayaran bunga utang dan subsidi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap PDB (*Product Domestic Bruto*) di Indonesia baik jangka panjang dan jangka pendek. Variabel belanja pemerintah pusat dalam jangka panjang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0.000, sedangkan dalam jangka pendek variabel belanja pemerintah pusat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0.0003. Variabel pembayaran bunga utang dalam jangka panjang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0.4695, sedangkan dalam jangka pendek variabel pembayaran bunga utang juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0.3051. Variabel subsidi dalam jangka panjang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0.000, sedangkan dalam jangka pendek subsidi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0.000.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Neli, and Nalyda Yola Althofia. 2015. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Propinsi Jawa Barat Tahun 2012.Pdf." *Jurnal Aplikasi Statistika dan Komputasi Statistik* 7(1): 1-20.
- Bachtiar, Hangga Filardikh, Eleonora Sofilda, and Sri Yani Kusumastuti. 2015. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, Dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013." *seminar Nasional cendekiawan*: 682-88.
- Dan, Ekonomi, and Kebijakan Publik. 2014. "Kebijakan Subsidi Bbm Dan Efisiensi Perekonomian." VI(09).
- Guritno Mangkoesobroto. 1994. *Ekonomi Publik*. 3rd ed. yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2013. *Makroekonomi*. 6th ed. ed. Erlangga. jakarta.
- Muqorrobin, Y. 2015. "Factors Influencing Economic Growth in Indonesia: Error Correction Model (Ecm)." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 16(1): 1-13.
- Nalle, Frederic Winston, Fakultas Ekonomi, and Universitas Wisnuwardhana. 2015. "Ada Pdrbnya Juga." (1).
- Neng Dilah Nur Fadillah, AS, and Hady Sutjipto. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Ekonomi-Qu* 8(2).
- Sadono Sukirno. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. 3rd ed. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Safari, Menik Fitriani, and Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. 2016. "Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Seminar Nasional: Penguatan Hubungan antara Pengembangan Keterampilan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan Generasi Muda*: 216-27. http://eprints.uny.ac.id/31261/1/skripsi_menik_fitriani_safari_12804241004.pdf.
- Saleh, Samsubar. 2008. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pinjaman Luar Negeri Serta Imbasnya Terhadap APBN." *Unisia* 31(70): 343-63.
- Setiadi, Dedi. 2017. "ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA." *jurnal ilmu ekonomi mulawarman* 2 (2).
- Wibowo, Edi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet, and Riyadi Surakarta. 2008. "PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA Edi Wibowo Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta." *Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.* 8(1): 16-24.
- widarjono, agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviewa*. kelima. yogyakarta: UPP STIE YKPN.